

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Jambi secara geografis terletak diantara $0^{\circ} 45'$ LS sampai $2^{\circ} 45'$ LS dan $101^{\circ} 10'$ BT sampai $104^{\circ} 55'$ BT. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, disebelah timur berbatasan dengan laut china selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan disebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Luas wilayah Provinsi Jambi secara keseluruhan adalah $53,435 \text{ Km}^2$ dengan luas daratan sebesar $50.160,05 \text{ Km}^2$ dan luas perairan sebesar $3.274,95 \text{ Km}^2$.

- ❖ Kabupaten Merangin 7.679 km^2 (15,31%)
- ❖ Kabupaten Tebo 6.461 km^2 (12,88%)
- ❖ Kabupaten Sarolangun 6.184 km^2 (12,33%)
- ❖ Kabupaten Batanghari 5.804 km^2 (11,57%)
- ❖ Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.445 km^2 (10,86%)
- ❖ Kabupaten Muaro Jambi 5.326 km^2 (10,62%)
- ❖ Kabupaten Bungo 4.659 km^2 (9,29%)
- ❖ Kabupaten Tanjung Jabung Barat $4.649,85 \text{ km}^2$ (9,27%)
- ❖ Kabupaten Kerinci $3.355,27 \text{ km}^2$ (6,69%)
- ❖ Kota Sungai Penuh $391,5 \text{ km}^2$ (0,78%)
- ❖ Kota Jambi $205,43 \text{ km}^2$ (0,41%)

Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi terletak di Kabupaten Merangin dengan luas wilayah 7.679 km^2 atau sebesar 15,31 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun dengan masing-masing luas wilayah sebesar 6.461 km^2 dan 6.184 km^2 . Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan

kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentangan terjadi perubahan iklim.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi, Provinsi Jambi memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Kewilayahan dengan ciri geografis utama dengan kawasan dataran rendah, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan hutan tropis alami Gunung Kerinci, Taman Nasional, Sungai Batanghari, Danau Gunung Tujuh, dan Taman Bumi Merangin sebagai warisan alam geologi.
- b. Potensi sumber daya alam berupa pertambangan, energi dan sumber daya mineral, pertanian terutama perkebunan, kehutanan, serta kelautan dan perikanan
- c. Suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan.

4.2 Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, data berdasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan rentan waktu yang digunakan yaitu selama tahun 2018-2022. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan *non purposive sampling*, dari 11 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama 5 tahun sehingga di peroleh 55 data pengamatan.

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil dari analisis statistik deskriptif, berikut disajikan karakteristik sampel mengenai variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang akan ditampilkan dalam jumlah sampel (N), nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata sampel (mean) dan Standar deviasi.

Tabel 4. 1
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	55	3.85	24.89	8.8047	4.92472
Dana Perimbangan	55	53.41	104.26	73.5667	8.30775
SILPA	55	.00	29.10	7.6935	5.39201
Belanja Daerah	55	90.21	126.73	99.9664	5.83015
Kinerja Keuangan Daerah	55	59.77	151.39	96.9795	20.83186
Valid N (listwise)	55				

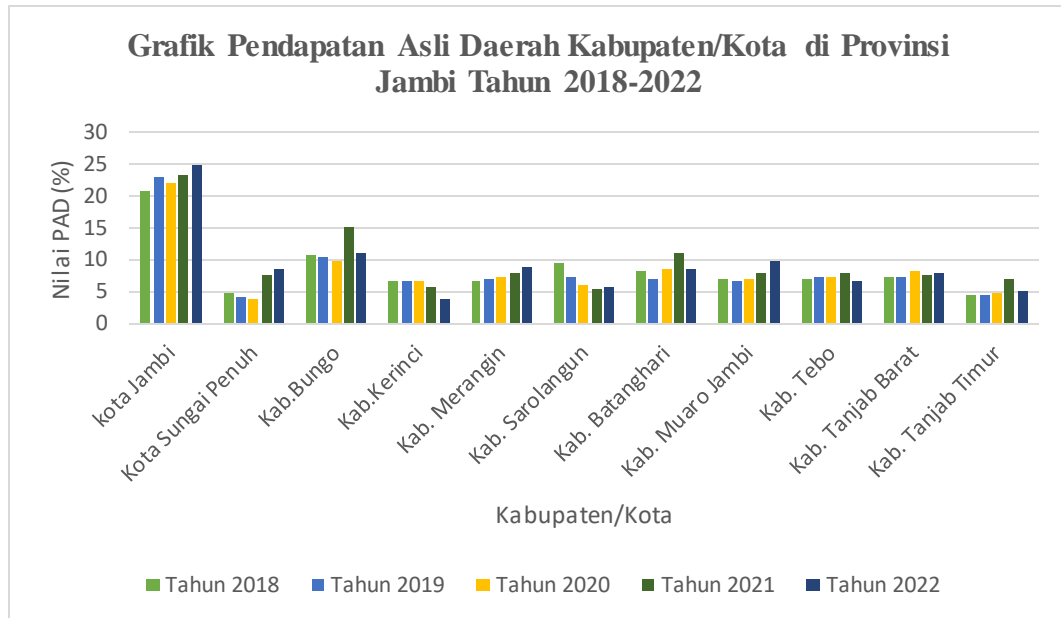
Sumber : Data Olahan SPSS versi 25

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima dari sumber potensi pendapatan yang ada di suatu wilayah/daerah yang berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku, pendapatan asli daerah juga termasuk suatu sumber pendapatan suatu daerah guna mendanai kegiatan pemda dan pembangunan daerah. Berdasarkan Tabel 4.1 Hasil dari analisis deskriptif Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018-2022 memperoleh nilai terendah sebesar 3,85 dan nilai tertinggi sebesar 24,89 dengan rata-rata sebesar 8,8047 serta standar deviasi sebesar 4,92472.

Gambar 4. 1
Grafik Pendapatan Asli Daerah



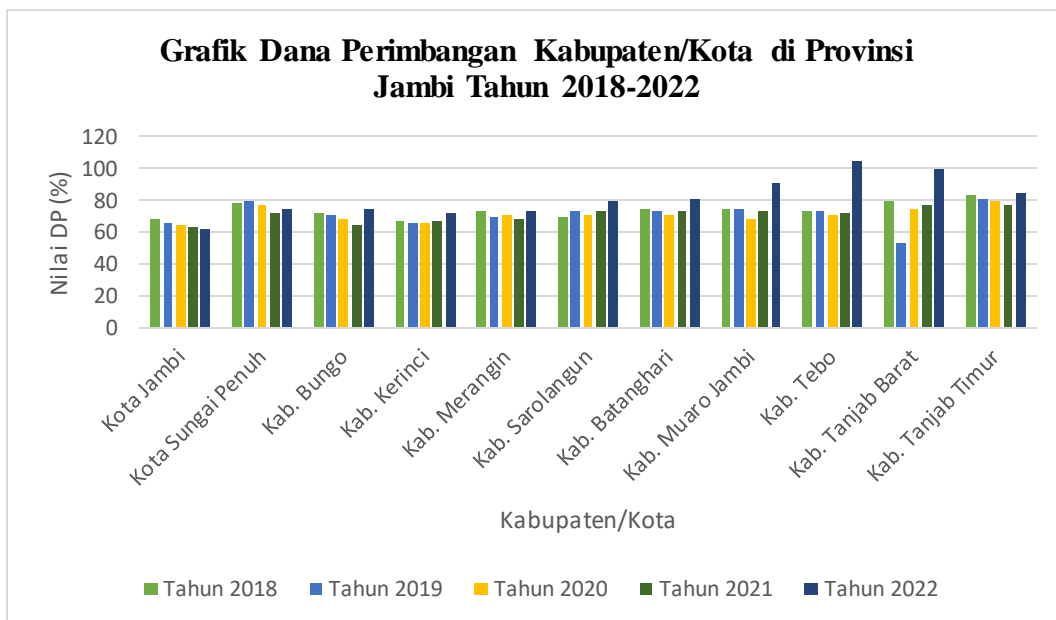
Jika dilihat dari gambar 4.1 grafik Pendapatan Asli Daerah, masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dan penurunan PAD dari 2018-2022. Kota Jambi PAD memiliki nilai terendah sebesar 20,86% pada tahun 2018 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 24,89% pada tahun 2022. Kota Sungai penuh memiliki nilai terendah sebesar 3,88% pada tahun 2020 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 8,6% pada tahun 2022. Kabupaten Bungo memiliki nilai terendah sebesar 9,9% pada tahun 2020 dan memiliki nilai tertinggi 15,22% pada tahun 2021. Kabupaten Kerinci memiliki nilai terendah sebesar 3,85% pada tahun 2022 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 5,64% pada tahun 2021. Kabupaten Merangin memiliki nilai terendah sebesar 6,69% pada tahun 2018 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 8,83% pada tahun 2022. Kabupaten Sarolangun memiliki nilai terendah 5,56% pada tahun 2021 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 9,65% pada tahun 2018. Kabupaten Batanghari memiliki nilai terendah sebesar 6,93% pada tahun 2019 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 11,04% pada tahun 2021. Kabupaten Muaro Jambi memiliki nilai terendah sebesar 6,7% pada tahun 2019 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 9,87 pada tahun 2022. Kabupaten Tebo memiliki nilai terendah sebesar 6,68% pada tahun 2022 dan

memiliki nilai tertinggi sebesar 7,96% pada tahun 2021. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki nilai terendah sebesar 7,23% pada tahun 2019 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 8,13% pada tahun 2020. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki nilai terendah sebesar 4,51% pada tahun 2019 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 7,02% pada tahun 2021.

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN guna membantu melaksanakan kewenangan Pemda untuk mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berdasarkan Tabel 4.1 Hasil dari analisis deskriptif Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018-2022 memperoleh nilai terendah sebesar 53,41 dan nilai tertinggi sebesar 104,26 dengan rata-rata sebesar 73,5667 serta standar deviasi sebesar 8,30775.

Gambar 4. 2
Grafik Dana Perimbangan



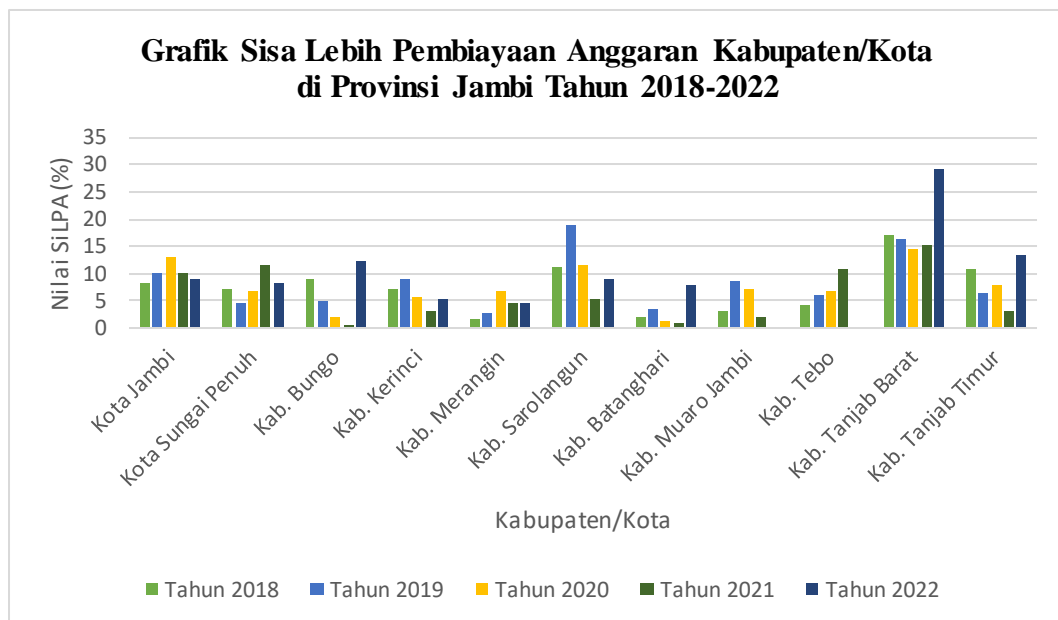
Jika dilihat dari gambar 4.2 grafik Dana Perimbangan, masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dan penurunan Dana Perimbangan dari 2018-2022. Kota Jambi Dana Perimbangan memiliki nilai terendah sebesar 61,57% pada tahun 2022 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 68,36% pada tahun 2018. Kota Sungai penuh memiliki nilai terendah sebesar 71,6% pada tahun 2021 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 79,92% pada tahun 2019. Kabupaten Bungo memiliki nilai terendah sebesar 64,59% pada tahun 2021 dan memiliki nilai tertinggi 75,11% pada tahun 2022. Kabupaten Kerinci memiliki nilai terendah sebesar 65,21% pada tahun 2020 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 71,82% pada tahun 2022. Kabupaten Merangin memiliki nilai terendah sebesar 68,46% pada tahun 2021 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 73,64% pada tahun 2022. Kabupaten Sarolangun memiliki nilai terendah 69,16% pada tahun 2018 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 79,66% pada tahun 2022. Kabupaten Batanghari memiliki nilai terendah sebesar 71,15% pada tahun 2020 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 81,1% pada tahun 2022. Kabupaten Muaro Jambi memiliki nilai terendah sebesar 68,78% pada tahun 2020 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 90,29% pada tahun 2022. Kabupaten Tebo memiliki nilai terendah sebesar 70,17% pada tahun 2020 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 104,26% pada tahun 2022. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki nilai terendah sebesar 53,41% pada tahun 2019 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 99,58% pada tahun 2022. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki nilai terendah sebesar 76,6% pada tahun 2021 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 84,29% pada tahun 2022.

c) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Menurut Permendagri No.77 Tahun 2020: Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bersumber dari pelampauan penerima PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan pendapatan daerah yang sah lainnya, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga hingga dengan akhir tahun belum diselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak

tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja. Hasil dari analisis dekstriptif SiLPA Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018-2022 memperoleh nilai terendah sebesar 0,00 dan nilai tertinggi sebesar 29,10 dengan rata-rata sebesar 7,6935 serta standar deviasi sebesar 5,39201.

Gambar 4.3
Grafik Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran



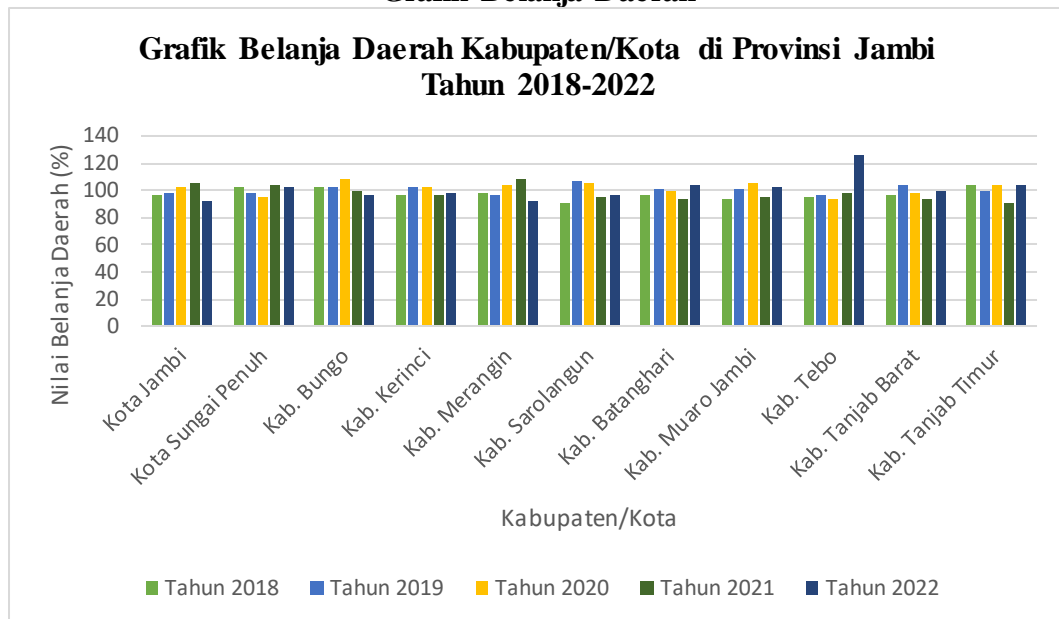
Jika dilihat dari gambar 4.3 grafik Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dan penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dari 2018-2022. Kota Jambi SiLPA memiliki nilai terendah sebesar 8,1% pada tahun 2018 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 13,02% pada tahun 2020. Kota Sungai penuh memiliki nilai terendah sebesar 4,57% pada tahun 2019 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 11,5% pada tahun 2021. Kabupaten Bungo memiliki nilai terendah sebesar 0,45% pada tahun 2021 dan memiliki nilai tertinggi 12,2% pada tahun 2022. Kabupaten Kerinci memiliki

nilai terendah sebesar 3% pada tahun 2021 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 8,83% pada tahun 2019. Kabupaten Merangin memiliki nilai terendah sebesar 1,75% pada tahun 2018 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 6,92% pada tahun 2020. Kabupaten Sarolangun memiliki nilai terendah 5,52% pada tahun 2021 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 18,85% pada tahun 2019. Kabupaten Batanghari memiliki nilai terendah sebesar 0,99% pada tahun 2021 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 7,84% pada tahun 2022. Kabupaten Muaro Jambi memiliki nilai terendah sebesar 0% pada tahun 2022 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 8,78% pada tahun 2019. Kabupaten Tebo memiliki nilai terendah sebesar 0% pada tahun 2022 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 10,7% pada tahun 2021. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki nilai terendah sebesar 14,52% pada tahun 2020 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 29,1% pada tahun 2022. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki nilai terendah sebesar 3,29% pada tahun 2021 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 13,42% pada tahun 2022.

d) Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan belanja daerah dikenal juga sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah dengan mengutamakan pendanaan urusan pemerintah wajib terkait dengan pelayanan dasar untuk memenuhi standar pelayanan minimal. Hasil dari analisis dekstriptif Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018-2022 memperoleh nilai terendah sebesar 90,21 dan nilai tertinggi sebesar 126,73 dengan rata-rata sebesar 99,9664 serta standar deviasi sebesar 5,83015.

Gambar 4. 4
Grafik Belanja Daerah



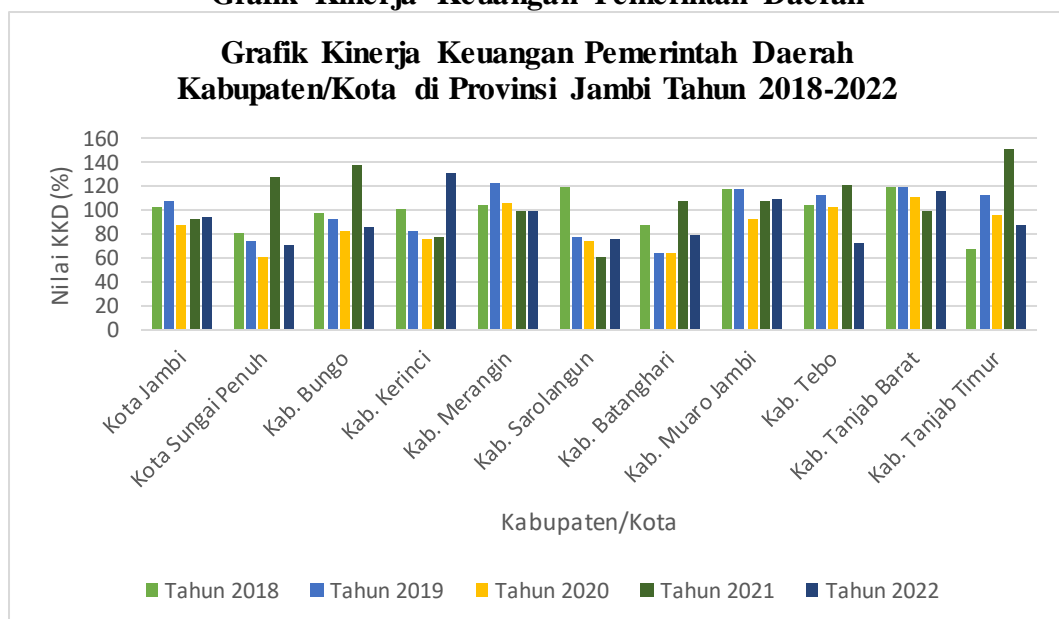
Jika dilihat dari gambar 4.4 grafik Belanja Daerah, setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dan penurunan Belanja Daerah dari 2018-2022. Kota Jambi Belanja Daerah memiliki nilai terendah sebesar 92,95% pada tahun 2022 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 105,29% pada tahun 2021. Kota Sungai penuh memiliki nilai terendah sebesar 94,92% pada tahun 2020 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 103,27% pada tahun 2021. Kabupaten Bungo memiliki nilai terendah sebesar 96,15% pada tahun 2022 dan memiliki nilai tertinggi 108,9% pada tahun 2020. Kabupaten Kerinci memiliki nilai terendah sebesar 96,42% pada tahun 2021 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 102,46% pada tahun 2019. Kabupaten Merangin memiliki nilai terendah sebesar 92,64% pada tahun 2022 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 108,69% pada tahun 2021. Kabupaten Sarolangun memiliki nilai terendah 90,47% pada tahun 2018 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 107,63% pada tahun 2019. Kabupaten Batanghari memiliki nilai terendah sebesar 93,25% pada tahun 2021 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 104,36% pada tahun 2022. Kabupaten Muaro Jambi memiliki nilai terendah sebesar 93,97% pada tahun 2018 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 105,15% pada tahun 2020. Kabupaten Tebo memiliki nilai terendah sebesar 94,12% pada tahun 2020 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 126,73%

pada tahun 2022. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki nilai terendah sebesar 93,68% pada tahun 2021 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 103,66% pada tahun 2019. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki nilai terendah sebesar 90,21% pada tahun 2021 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 104,43% pada tahun 2022.

e) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah guna mendukung berjalanya sistem pemerintah, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung seluruhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai kewenangan di dalam menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat yang di dasarkan pada undang-undang. Hasil dari analisis deskriptif variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 - 2022 memiliki nilai terendah sebesar 59,77 dan nilai tertinggi sebesar 151,39 dengan rata-rata sebesar 96,9795 serta standar deviasi sebesar 20,83186.

Gambar 4.5
Grafik Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah



Jika dilihat dari gambar 4.5 grafik Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dan penurunan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dari 2018-2022. Kota Jambi Kinerja keuangan daerah memiliki nilai terendah sebesar 88,15% pada tahun 2020 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 108,04% pada tahun 2019. Kota Sungai paku memiliki nilai terendah sebesar 60,3% pada tahun 2020 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 127,85% pada tahun 2021. Kabupaten Bungo memiliki nilai terendah sebesar 82,31% pada tahun 2020 dan memiliki nilai tertinggi 136,94% pada tahun 2021. Kabupaten Kerinci memiliki nilai terendah sebesar 75,48% pada tahun 2020 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 131,35% pada tahun 2022. Kabupaten Merangin memiliki nilai terendah sebesar 98,62% pada tahun 2022 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 122,54% pada tahun 2019. Kabupaten Sarolangun memiliki nilai terendah 59,77% pada tahun 2021 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 119,09% pada tahun 2018. Kabupaten Batanghari memiliki nilai terendah sebesar 63,33% pada tahun 2020 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 107,56% pada tahun 2021. Kabupaten Muaro Jambi memiliki nilai terendah sebesar 93,14% pada tahun 2020 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 117,43% pada tahun 2018. Kabupaten Tebo memiliki nilai terendah sebesar 71,93% pada tahun 2022 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 120,47% pada tahun 2021. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki nilai terendah sebesar 98,77% pada tahun 2021 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 119,88% pada tahun 2019. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki nilai terendah sebesar 67,8% pada tahun 2018 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 151,39% pada tahun 2021.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Pengukuran ini dilakukan guna mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, dengan kriteria pengukuran melihat nilai signifikansi (*Asym.sig*), jika nilai *Sig* > 0,05 sehingga data dapat dikatakan residual terdistribusi normal, sedangkan jika nilai *Sig* < 0,05 sehingga data dapat dikatakan

residual terdistribusi tidak normal. Hasil uji statistik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4. 2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	19.42720261
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.055
	Negative	-.047
Test Statistic		.055
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data Olahan SPSS versi 25

Berdasarkan hasil uji normalitas yang menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* menunjukkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal. Dapat dilihat dari tabel 4.2 nilai signifikansi *Asymp Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 yang mana melebihi nilai alpa yaitu 0,05 ($0,200 > 0,05$). Berdasarkan hasil dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas diuji dengan menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* dari model regresi. Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan *Tolerance* $> 0,10$.

Tabel 4. 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.828	1.207
	Dana Perimbangan	.755	1.324
	SILPA	.974	1.026
	Belanja Daerah	.906	1.104
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah			

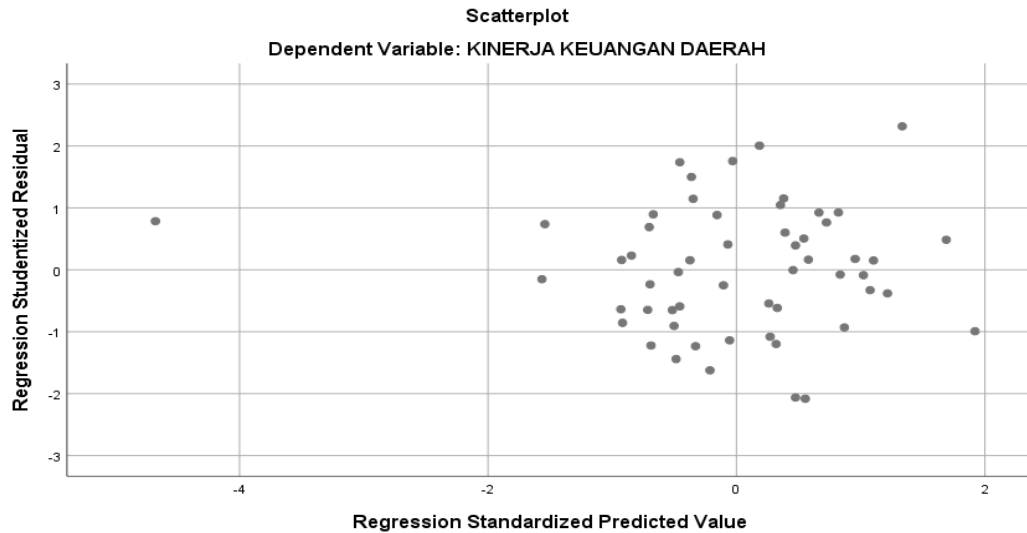
Sumber : Data Olahan SPSS versi 25

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dari semua variabel besar dari 0,10 dan nilai *VIF* dari semua variabel kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari semua variabel tidak terjadi masalah multikolinearitas.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan guna menentukan ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik plot atau uji scatter plot. Titik-titik pada scatter plot apabila membentuk pola tertentu dan beraturan maka menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas, sebaliknya apabila titik-titik tidak terbentuk pola tertentu dan tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4. 6
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Scatterplot



Sumber : Data Olahan SPSS versi 25

Berdasarkan pada gambar 4.6 berdasarkan pada gambar diatas tidak dapat diambil kesimpulan yang pasti mengenai terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas, hal ini dibuktikan dengan terdapat pola tertentu dalam pengujian heteroskedastisitas

Uji *scatterplot* belum bisa memenuhi persyaratan uji heteroskedastisitas karena tidak ada keputusan yang pasti mengenai terjadinya heteroskedastisitas atau tidak, maka digunakan pengujian lain agar dapat terhindar dari indikasi heteroskedastisitas. Yaitu uji *Glejser*, uji ini merupakan uji guna mengetahui apakah sebuah model regresi menunjukkan indikasi heteroskedastisitas atau tidak dengan cara meregres absolut residual. Dasar pengambilan keputusan pada pengujian ini apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka data tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. 4
Uji Heteroskedastisitas Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	57.262	27.836		2.057	.045
	PAD	-.653	.340	-.283	-1.923	.060
	Dana Perimbangan	-.073	.211	-.053	-.345	.731
	SILPA	-.153	.286	-.073	-.535	.595
	Belanja Daerah	-.294	.275	-.151	-1.070	.290

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber : Data Olahan SPSS versi 25

Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan dari semua variabel memperoleh nilai lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari indikasi heteroskedastisitas.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara data observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Model yang digunakan dalam uji autokorelasi dalam penelitian ini berupa model *Durbin-Watson* dengan penarikan kesimpulan apabila $D_u < D_w$ hitung $< 4 - D_u$ maka tidak terjadi autokorelasi. Berikut hasil dari pengujian:

Tabel 4. 5
Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.900 ^a	.810	.795	9.44088	2.055

a. Predictors: (Constant), SILPA, Belanja Daerah, PAD, Dana Perimbangan

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : Data Olahan SPSS versi 25

Berdasarkan Tabel 4.5 disimpulkan bahwa diperoleh nilai Du sebesar 1,7240, lebih kecil dari nilai *Durbin-Watson* (Dw) sebesar 2,055, dan lebih besar nilai 4-Du sebesar 2,276 dari nilai Dw ($1,7240 < 2,055 < 2,276$). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya indikasi terjadi autokorelasi.

4.2.3 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	216.813	23.474		9.236	.000
	PAD	.584	.285	.138	2.052	.045
	Dana Perimbangan	.154	.177	.061	.874	.387
	Belanja Daerah	-1.263	.231	-.353	-5.458	.000
	SILPA	-1.308	.098	-.829	-13.407	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Data Olahan SPSS versi 25

Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas diperoleh hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 216,813 + 0,584 \text{ PAD} + 0,154 \text{ Dana Perimbangan} - 1,308 \text{ SiLPA} - 1,263 \text{ Belanja Daerah} + e$$

Persamaan regresi linear berganda dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) dengan nilai 216,813. Hasil ini dapat diartikan, apabila besarnya nilai seluruh variabel independen sama dengan nol, maka besarnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah 216,813.
2. Koefisien Regresi (b_1) variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1) sebesar 0,584 yang berarti menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan Kinerja Keuangan Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 satuan PAD, maka akan terjadi

kenaikan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,584 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

3. Koefisien Regresi (b_2) variabel Dana Perimbangan (X_2) sebesar 0,154 yang berarti menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 satuan Dana Perimbangan, maka akan terjadi kenaikan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,154 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
4. Koefisien Regresi (b_3) variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (X_3) sebesar -1,308 yang berarti menunjukkan arah hubungan negatif (berlawanan arah) antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 satuan SiLPA, maka akan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar -1,308 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
5. Koefisien Regresi (b_4) variabel Belanja Daerah (X_4) sebesar -1,263 yang berarti menunjukkan arah hubungan negatif (berlawanan arah) antara Belanja Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 satuan Belanja Daerah, maka akan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar -1,263 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

4.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis

4.2.4.1 Hasil Uji f

Uji f dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dan seberapa besar pengaruh dari variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Pengukuran yang digunakan dalam uji f adalah jika nilai signifikan $< 0,05$ berarti bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Berikut hasil dari uji f pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 7
Hasil Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18977.689	4	4744.422	53.230	.000 ^b
	Residual	4456.507	50	89.130		
	Total	23434.196	54			
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah						
b. Predictors: (Constant), PAD, Dana Perimbangan, SiLPA, Belanja Daerah						

Sumber : Data Olahan SPSS versi 25

Berdasarkan hasil pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa model penelitian sudah layak dan baik digunakan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen (bebas) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Sehingga H1 diterima.

4.2.4.2 Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana dan berapa besar pengaruh dari variabel bebas secara masing-masing (persial) terhadap variabel terikat. Kriteria yang digunakan dalam uji f adalah jika nilai signifikan $< 0,05$ berarti bahwa semua variabel bebas secara masing-masing (persial) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Berikut hasil dari uji t pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 8
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	216.813	23.474		9.236	.000
	PAD	.584	.285	.138	2.052	.045
	Dana Perimbangan	.154	.177	.061	.874	.387
	SiLPA	-1.308	.098	-.829	-13.407	.000
	Belanja Daerah	-1.263	.231	-.353	-5.458	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Data Olahan SPSS versi 25

a. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh bahwa variabel PAD terdapat pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai *Sig* sebesar $0,045 < 0,05$. Dengan demikian, disimpulkan bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Maka H2 diterima.

b. Variabel Dana Perimbangan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh bahwa variabel Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai *Sig* sebesar $0,387 > 0,05$. Dengan demikian, disimpulkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Maka H3 ditolak.

c. Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh bahwa variabel SiLPA memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai *Sig* sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian,

disimpulkan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Maka H4 diterima.

d. Variabel Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh bahwa variabel Belanja Daerah memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai *Sig* sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, disimpulkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Maka H5 diterima.

Tabel 4. 9
Ringkasan Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₁	PAD, Dana Perimbangan, SiLPA dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Diterima
H ₂	PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Diterima
H ₃	Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Ditolak
H ₄	SiLPA berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Diterima
H ₅	Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Diterima

Sumber : Data Olahan

4.2.4.3 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (*Rsquare*)

Hasil pengujian koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 10
Hasil Uji Koefisien Determiiasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.900 ^a	.810	.795	9.44088	2.055
a. Predictors: (Constant), SILPA, Belanja Daerah, PAD, Dana Perimbangan					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah					

Sumber : Data Olahan SPSS versi 25

Berdasarkan pada tabel 4.10 terdapat nilai *R Square* dan nilai *Adjusted R Square*, nilai *R Square* digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen, sementara *Adjusted R Square* digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen menjelaskan variabel dependen jika peneliti menggunakan lebih dari 2 variabel independen. Pada penelitian ini nilai koefisien determinasi dilihat pada nilai *Adjusted R Square*, hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,795. Hal tersebut berarti bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen 79,5% dan sisanya 20,5% dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dijelaskan atau berada diluar dari penelitian yang dapat berupa variabel-variabel lain seperti ukuran pemerintah daerah (Lestari dan Dini.,2020), pertumbuhan ekonomi dan opini audit (Insani dkk., 2023), *Leverage* dan *Good Corporate Governance* (Rode dan Dewi.,2019), Kekayaan Daerah (Armaja dkk,2017) yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen PAD, Dana Perimbangan, SiLPA, Belanja daerah terhadap variabel dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan beberapa hipotesis menunjukkan hasil bahwa tidak semua variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

4.3.1 Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, SiLPA dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa PAD, Dana Perimbangan, SiLPA, dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), hasil ini menunjukkan bahwa PAD, Dana Perimbangan, SiLPA dan Belanja Daerah dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun nilai koefisien determinasi sebesar 0,795 atau 79,5% yang artinya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dapat dijelaskan oleh PAD, Dana Perimbangan, SiLPA dan Belanja Daerah sebesar 79.5%.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Menurut Mahmudi (2019) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mencatat, mengukur, menilai dan mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Apabila kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan baik dan benar maka semakin baik juga dalam hal pengelolaan keuangannya, baik dalam hal pengelolaan pendapatan maupun belanja yang dilakukan oleh daerah tersebut.

Sari & Halmawati (2021) mengatakan bahwa Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil penilaian secara kuantitatif dari suatu kegiatan/program yang

dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan supaya kualitas sektor publik jauh lebih baik. Sulisty (2018) mengatakan bahwa Kinerja adalah pencapaian atas apa yang dianggarkan, secara individu maupun organisasi. Singkatnya, kinerja seseorang atau organisasi dianggap baik jika hasil yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

4.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga hipotesis kedua diterima. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,045 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,045 < 0,05$). Hal ini menunjukkan semakin besar kontribusi PAD untuk mendanai pembangunan dan pelayanan masyarakat, bisa dikatakan ada peningkatan kinerja keuangan Pemda, jika PAD meningkat maka dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota naik atau meningkat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Verawaty dkk, (2020) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Insani dkk., (2023) menyatakan Pemerintah daerah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menggali sumber kekayaan daerahnya secara merata. Putri dan Ratnawati (2023) menyatakan Apabila PAD meningkat maka kinerja keuangan daerah juga turut meningkat. karena pendapatan tersebut hasil jerih payah pemerintah yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Febriyanti (2022) menyatakan Semakin tinggi nilai pertumbuhan PAD pemerintah telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dan begitu sebaliknya. Sari dan Halmawati (2021) menyatakan PAD yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan PP No.12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan daerah, PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan asli

daerah yang sah lainnya. Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang diterima dari sumber dari suatu wilayah yang diperoleh berdasarkan undang-undang yang berlaku yang terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain.

Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah sangat baik dalam menggali potensi sumber kekayaan di daerah sendiri yang berdampak kepada terciptanya keselarasan antara pendapatan dan kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat sejalan dengan kebijakan dan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh pendapatan asli daerah yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan bahwa PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah serta mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Maka dengan peningkatan PAD yang signifikan ini dapat digunakan untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik, sehingga dapat dikatakan semakin baik kinerja keuangannya.

Tingginya PAD yang mampu dihasilkan daerah dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat, oleh karena itu dengan peningkatan pendapatan daerah akan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya sehingga memberikan dampak bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemda yang baik dapat tergambarkan dalam pengelolaan PAD yang baik juga, pemerintah daerah bisa memanfaatkan PAD sebagai tempat untuk mencapai kinerja yang lebih baik, PAD yang dimiliki dapat menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan maupun kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah dalam pencapaian kinerja setiap tahunnya.

Penyebab lainnya PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi karena rata-rata daerah mengalami

peningkatan PAD sejak 5 tahun terakhir. Seperti yang terjadi di Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjab Barat dan Kabupaten Tanjab Timur. Kenaikan pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi jambi dapat dilihat pada tahun 2018 sebesar 1.211,73 Miliar terus mengalami peningkatan hingga 10% pada tahun 2022 sebesar 1.334,69 Miliar. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah sangat baik dalam menggali potensi sumber kekayaan yang ada di daerah sehingga salah satu sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah dan distribusi daerah terus meningkat, ini menunjukkan perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jambi terus meningkat, walaupun pada tahun 2020 hampir seluruh daerah mengalami penurunan PAD rata-rata sebesar 7% dari tahun sebelumnya 2019, penurunan ini terjadi akibat wabah covid-19 melanda Negara Republik Indonesia, sehingga seluruh aktivitas masyarakat harus dibatasi dan memperlambat perekonomian.

PAD memiliki peran penting dalam kinerja keuangan pemerintah daerah karena memiliki dampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Jumlah PAD yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk membiayai program-program pembangunan dan kegiatan operasional pemerintah, dengan demikian PAD yang cukup memberikan fleksibilitas dan keberlanjutan dalam menjalankan kegiatan pemerintah. Selain itu PAD yang tinggi juga dapat mencerminkan perumbuhan ekonomi yang baik di daerah tersebut, sebab pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui investasi dalam infrastruktur, layanan publik dan program-program sosial.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ratnasari dan Meirini (2022) menyatakan tingkat penerimaan pendapatan asli daerah di Jawa Timur masih tergolong rendah daripada total pendapatan daerah sehingga pengelolaan PAD sebagai input dalam pencapaian target pemda di Jawa Timur dinilai kurang efisien serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi dan

sumberdaya daerah melalui pajak dan retribusi masih rendah. Machmud dan Radjak (2018) yang membuktikan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu bentuk kemandirian suatu daerah yang bersumber dari kegiatan perekonomian daerah itu sendiri, jika pemerintah daerah tidak bisa dalam menggali sumber kekayaan daerahnya sendiri maka tidak akan terjadi peningkatan kekayaan sumber kekayaan yang diperoleh dari daerah itu sendiri, sehingga tidak akan tercapai keselarasan antara pendapatan dan kinerja keuangan pemerintah daerah yang berdampak tidak tercapainya kebijakan dan kesejahteraan masyarakat.

4.3.3 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,387 yang lebih besar dari 0,05 ($0,387 > 0,05$), Hasil ini sejalan dengan penelitian Anggraini dan Artini (2019) yang membuktikan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan adalah salah satu pendapatan yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah (otonom) guna membiayai kebutuhan daerah dalam upaya melaksanakan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemda untuk mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Budianto dan Stanly., 2021).

Dana perimbangan adalah dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, berguna untuk memenuhi biaya lebihnya belanja daerah dan keperluan daerahnya dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Apabila makin tinggi besaran dana perimbangan yang didapat dari pemerintah pusat, maka dapat terlihat seberapa kuat pemerintah daerah memiliki

ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam menyelesaikan kebutuhan daerah. Dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan Pemda belum mampu mengelola secara maksimal dana yang ditransfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit, oleh karena itu untuk menutupi kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Besarnya penerimaan Dana perimbangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah belum bisa mengoptimalkan/menggunakan dana dari pemerintah pusat dengan baik.

Penyebab Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi karena terdapat penurunan pada komposisi Dana Alokasi Khusus (DAK), penurunan terjadi ada pada realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) pada tahun 2018 sebesar 819,97 Miliar terus mengalami hingga 5% pada tahun 2022 sebesar 776,73 Miliar. Hal yang membuat penurunan terhadap DAK bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor kebijakan pemerintah yang melakukan penggeseran dana alokasi khusus ke daerah yang lebih di prioritaskan untuk pembangunan daerah tertentu, serta ada perubahan fiskal dan anggaran pemerintah yang membuat DAK berdampak mengalami penurunan. Faktor lain yang membuat DAK menurun bisa terjadi karena kondisi ekonomi yang tidak stabil sehingga pemerintah menjaga keseimbangan Negara dan memprioritaskan pengeluaran yang lebih mendesak.

Dana perimbangan tidak bisa menjamin kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik. Sebab dana perimbangan sendiri merupakan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu menyelesaikan kebutuhan daerah, bukan dana yang didapatkan dari hasil menggali potensi sumber-sumber kekayaan yang ada di daerah itu sendiri. Pemerintah daerah lebih baik memfokuskan pada penambahan PAD untuk membiayai hal-hal yang bersifat meningkatkan kinerja keuangan. Namun bukan berarti dana perimbangan tidak perlu di dapatkan karena dana perimbangan dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Lintang dkk, (2023), Insani dkk, (2023) yang menyatakan bahwa Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti bahwa dana perimbangan yang semakin meningkat dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah dan kapasitas daerah untuk mengeksplorasi potensi ekonominya. Putri & Darmayanti (2019) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengindikasikan bahwa semakin besar ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga kemampuan daerah tersebut dalam menggali potensi dari daerahnya sendiri semakin rendah. Saputri & Kurnia (2020) menyatakan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, artinya semakin tinggi nilai transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah dan sebaliknya.

4.3.4 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga hipotesis keempat diterima. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), yang berarti semakin tinggi SiLPA maka akan semakin menurun kinerja keuangan pemerintah daerah. SiLPA yang berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan semakin dikit angka SiLPA dalam laporan keuangan menandai bahwa pembiayaan dilakukan dengan baik untuk membiayai kegiatan serta menutupi defisit yang terjadi sehingga tidak ada dana yang tidak digunakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ratnasari dan Meirini (2022) membuktikan bahwa SiLPA berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah, artinya Semakin sedikit angka SiLPA dalam laporan keuangan menandai bahwa pembiayaan dilakukan dengan baik untuk membiayai kegiatan serta menutupi defisit yang terjadi sehingga tidak ada dana yang tidak dipergunakan. Djuniar dan Zuraida (2018) yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh negatif

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin tinggi SILPA akan berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampuan penerimaan PAD, pelampuan penerimaan pendapatan transfer, pelampuan penerimaan pendapatan daerah yang sah lainnya, pelampuan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga hingga dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana karena tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Sisa lebih pembiayaan anggaran terjadi ketika pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah melebihi pengeluaran yang telah direncanakan, sisa lebih pembiayaan anggaran ini bisa berdampak buruk pada kinerja keuangan pemerintah daerah karena bisa menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan anggaran seperti kesalahan dalam estimasi kebutuhan atau penentuan prioritas pengeluaran hal ini bisa menyebabkan ketidaksamaan dalam penggunaan anggaran dan mengurangi efektivitas penggunaan dana publik. Selain itu, sisa lebih pembiayaan anggaran juga menunjukkan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran, hal ini jelas merugikan pemerintah daerah karena uang yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat malah terbuang percuma. Sisa lebih pembiayaan anggaran juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, ketika ada sisa anggaran yang tidak digunakan dengan baik dana tersebut tidak dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik atau program-program sosial yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Akibatnya pembangunan daerah menjadi terhambat dan kualitas hidup masyarakat tidak meningkat sejalan dengan potensi yang seharusnya.

Penyebab lainnya sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh karena masih terdapat masing-masing daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi mengalami kenaikan SILPA yang cukup signifikan, seperti yang di alami Kota Jambi mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020 sebesar 211,18 Miliar (13,02%). Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan cukup signifikan pada

tahun 2021 sebesar 89,48 Miliar (11,50%). Kabupaten Bungo mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 154,51 Miliar (12,20%). Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2019 sebesar 114,72 Miliar (8,83%). Kabupaten Merangin mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2020 sebesar 64,56 Miliar (4,69%). Kabupaten Sarolangun mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2019 sebesar 249,66 Miliar (18,85%). Kabupaten Batanghari mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 99,48 Miliar (7,84%). Kabupaten Muaro Jambi mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2019 sebesar 122,95 Miliar (8,78%). Kabupaten Tebo mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2021 sebesar 124,92 Miliar (10,70%). Kabupaten Tanjab Barat mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 411,37 Miliar (29,10%). Kabupaten Tanjab Timur mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 151,72 Miliar (13,42%). Jika dilihat pada tahun 2018 total SiLPA dari masing-masing daerah sebesar 1.015,94 Miliar mengalami kenaikan cukup signifikan hingga 25% pada tahun 2022 sebesar 1.272,24 Miliar. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan anggaran sehingga menyebabkan adanya ketidaksamaan dalam penggunaan anggaran dan mengurangi efektivitas penggunaan dana publik.

Penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan anggaran dengan teliti, efisien dan transparan agar sisa lebih pembiayaan anggaran dapat dihindari dan keuangan publik dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan sisa lebih pembiayaan anggaran yang terjadi dapat mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah yang menurun. Adanya angka SiLPA yang rendah menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang ekonomis, efektif, dan efisien sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan strategis yang digunakan sehingga dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang berasal dari rakyat untuk dikembalikan pada rakyat dengan baik (Ratnasari dan Meirini, 2022).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putri dan Ratnawati (2023) yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dampak sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi efisiensi atau tidaknya pengalokasian oleh Pemda. SiLPA yang terlalu besar dapat memberikan sinyal bahwa ada ketidakseimbangan dalam manajemen keuangan pemerintah daerah dan dapat mengganggu kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

4.3.5 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga hipotesis kelima diterima. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), yang berarti semakin tinggi Belanja Daerah maka akan semakin menurun Kinerja Keuangan Daerah. Belanja daerah yang berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah disebabkan oleh penggunaan belanja bersifat rutin (langsung) yang lebih besar dibandingkan belanja modal dan infrastruktur (tidak langsung) yang mana belanja modal memiliki nilai manfaat untuk jangka panjang bagi masyarakat yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tersedianya infrastruktur yang mumpuni dari penggunaan belanja yang bersifat rutin ini lah yang membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian Saputri dan Kurnia (2020), yang menyatakan bahwa Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Salsabila & Rahayu, (2021) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah, semakin tinggi Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tidak menjamin semakin tinggi pula pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta berdampak pada semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Menurut PP No.12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah adalah semua tanggung jawab Pemda

yang dihitung sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih selama tahun anggaran yang dimaksud. Belanja daerah diprioritaskan untuk urusan pemerintah wajib dan pelayanan dasar untuk memenuhi standar pelayanan minimal

Belanja daerah yang tidak terkelola dengan baik dapat memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja daerah yang tidak terkendali dapat menyebabkan defisit anggaran, jika belanja melebihi pendapatan yang diperoleh maka pemerintah daerah akan menghadapi kesulitan dalam membiayai kegiatan operasional dan pembangunan, sehingga ini bisa memaksa daerah untuk meminjam atau menggunakan sumber dana yang seharusnya dialokasikan untuk program-program penting lainnya. Apabila daerah harus meminjam untuk membiayai kegiatan operasional dan kegiatan lainnya maka akan ada ketergantungan pada pinjaman atau utang untuk menutupi defisit anggaran yang dapat mengakibatkan utang yang terus membengkak. Belanja yang tidak terencana dengan baik dapat menghambat investasi jangka panjang dalam infrastruktur, infrastruktur yang tidak memadai akan menghambat pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi daya saing daerah dan membatasi potensi pendapatan dimasa depan. Jika belanja tidak terkelola dengan baik biaya operasional bisa meningkat secara signifikan, sehingga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan anggaran, korupsi, atau kurangnya pengawasan bisa menyebabkan pemborosan dan pengeluaran yang tidak efisien.

Belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi rata-rata cenderung mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah terus melakukan peningkatan pembangunan demi kemajuan suatu daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilihat pada tahun 2018 perolehan dana belanja daerah sebesar 13.133,27 Miliar (96,17%) terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2022 sebesar 13.441,03 (96,23%). Penyebab lainnya belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah karena penggunaan belanja rutin seperti belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja modal yang mana ini berdampak pada tingkat pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan

demikian kemajuan suatu daerah. Dapat dilihat pada tahun 2018 penggunaan dana untuk belanja pegawai sebesar 4.995,33 Miliar lebih besar dari pada penggunaan dan untuk belanja modal hanya sebesar 2.890,53 Miliar. Pada tahun 2019 penggunaan dana untuk belanja pegawai sebesar 5.423,19 Miliar lebih besar dibandingkan penggunaan dana untuk belanja modal yang hanya sebesar 3.647,28 Miliar. Pada tahun 2020 penggunaan dana untuk belanja pegawai sebesar 5.343,71 Miliar lebih besar dibandingkan penggunaan dana untuk belanja modal yang hanya sebesar 1.658,71 Miliar. Pada tahun 2021 penggunaan dana untuk belanja pegawai sebesar 5.109,98 Miliar lebih besar dibandingkan penggunaan dana untuk belanja modal yang hanya sebesar 2.736,62 Miliar. Pada tahun 2022 penggunaan dana untuk belanja pegawai sebesar 5.067,41 Miliar lebih besar dibandingkan penggunaan dana untuk belanja modal yang hanya sebesar 2.608,92 Miliar.

Untuk mengatasi dampak negatif dari belanja daerah yang buruk pemerintah perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan anggaran yang baik, pengawasan yang ketat, penyusunan anggaran yang realitis, serta penggunaan teknologi untuk monitoring anggaran dapat membantu mencegah pemborosan dan korupsi. Selain itu, penguatan kapasitas SDM dibidang keuangan publik juga penting agar anggaran dapat dialokasikan dengan efektif sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, disimpulkan bahwa peningkatan terhadap belanja daerah tidak selalu mencerminkan kinerja keuangan pemerintah yang baik bahkan sebaliknya. Hasil penelitian ini tidak sejalan terhadap penelitian Defitri.,dkk (2021) yang membuktikan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja daerah yang tidak efisien, alokasi yang salah, dan kurangnya transparansi dapat berdampak negatif, penanganan yang baik dalam mengelola belanja daerah sangat penting untuk menjaga keuangan daerah agar tetap stabil dan berkelanjutan.